



Pemerintah Bakal Revisi Sistem Pilkada

JAKARTA—Pemerintah berencana merevisi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) karena rendahnya partisipasi pemilih dibandingkan saat digelarnya Pemilu.

Akbar Evandio & Stefani Yulindriani
redaksi@jibnews.co

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengakui ada kecenderungan penurunan partisipasi pemilih di Pilkada 2024 dibandingkan pilkada sebelumnya. Menurutnya, ada banyak faktor menurunnya minat pemilih, salah satu alasan penurunan partisipasi pemilih lantaran adanya kejenuhan masyarakat dengan pesta demokrasi yang terlalu berdekatan.

► Kejenuhan masyarakat dengan pesta demokrasi yang terlalu berdekatan menjadi salah satu alasan menurunnya partisipasi pemilih.

► Alokasi TPS, proses sosialisasi, maupun dinamika di daerah masing-masing menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih.

► Halaman 10

PEMENANG PILKADA DI BUMI MATARAM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di DIY sudah menyelesaikan hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024. Rekapitulasi itu dilakukan setelah penghitungan di tingkat PPS dan PPK selesai dilakukan.

KOTA JOGJA

Heroe Poerwadi-SW Supena 45.518 suara
Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan 87.485 suara
Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo 63.876 suara

Jumlah suara sah : 196.879 suara
Suara tidak sah : 11.522 suara



KABUPATEN SLEMAN

Kustini Sri Purnomo-Sukanto 232.465 suara
Harda Kiswaya-Danang Maharsa 381.580 suara

Jumlah suara sah : 614.045 suara
Suara tidak sah : 39.278 suara

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto 179.460 suara
Sutrisna Wibawa-Sumanto 131.122 suara
Sunaryanta-Mahmud Ardi Widanto 129.716 suara

Jumlah suara sah : 440.298 suara
Suara tidak sah : 17.083 suara

KABUPATEN BANTUL

Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi 80.917 suara
Abdul Halim Muslih-Aris Suharyanta 230.819 suara
Joko Budi Purnomo-Rony Wijaya 219.471 suara

Jumlah Suara sah : 531.207 suara
Suara tidak sah : 36.029 suara

KABUPATEN KULONPROGO

Aqung Setyawan-Ambar Purwoko 119.643 suara
Marija-Yusron Martofa 31.511 suara
Novida Kartika Hadhi-Rini Indriani 103.988 suara

Jumlah Suara sah : 255.142 suara
Suara tidak sah : 18.906 suara

Sumber: KPU Grafik: Harian Jogja/Sunu Jatmiko

Pemerintah Bakal...

"Ada juga faktor lain misalnya perlu kami dalam, yaitu daerah-daerah yang memang kandidatnya tidak berasal dari daerah tersebut. Mungkin ketidaktentuannya lebih rendah sehingga itu merupakan disinsentif bagi pemilih untuk memilih," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Ia pun mengaku saat ini Kementerannya tengah mempelajari dan segera mengevaluasi penyelenggaraan kontes pemilihan di Tanah Air, salah satunya kemungkinan merevisi sistem Pemilu dan Pilkada. "Apapun akan kami pelajari, angka-angkanya menjadi bahan masukan bagi kami ketika kami nanti akan merevisi sistem pemilu dan pilkada," ucapnya.

Bima mengamini revisi jarak dari antara pilpres dan pilkada masih menjadi kemungkinan. Kementerannya masih menampung segala usulan yang masuk ke instansinya. "Usulan memisahkan antara pilkada dan pileg yang lebih jauh lagi atau usulan untuk memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu yang lebih besar, yaitu revisi perbaikan sistem pemilu ke depan," kata Bima.

Anggota KPU RI, August Mellaz, mengatakan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di bawah 70%. "Kalau kami lihat sekilas, dari gambaran secara umum, [Secara nasional rata-rata] ya kurang lebih di bawah 70 persen," kata August Mellaz.

Mellaz mengatakan partisipasi pemilih di pilkada memang sering lebih rendah dibanding saat pilpres. Ia mengatakan angka pasti tingkat partisipasi pemilih harus menunggu

rekapitulasi resmi. "Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah," ujar dia.

Mellaz mengatakan partisipasi pemilih menurun akan menjadi bahan evaluasi. Ia menduga alokasi tempat pemungutan suara (TPS), proses sosialisasi, maupun dinamika di daerah masing-masing menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih.

"Secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu kan 800.000 TPS, 800.000 lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang. Nah, kalau sekarang di pilkada kan memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada," ujarnya.

Koalisi Partai

Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DIY mampu menembus dominasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilkada Serentak 2024. Dari lima Pilkada di Bumi Mataram, PDIP mampu unggul di tiga wilayah yakni di Kota Jogja, Sleman, dan Gunungkidul. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai pengaruh PDIP masih besar di DIY. "Sebetulnya pengaruh PDIP di Jogja masih dominan, sekalipun menghadapi koalisi KIM plus," ujarnya, Senin.

Paslon yang diusung PDIP itu yakni di Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto, di Kota Jogja Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan, dan di Sleman Harda Kiswaya-Danang Maharsa.

Menurut Zuly, koalisi partai KIM plus tidak banyak berdampak

pada hasil perolehan suara di Pilkada DIY. Di pilkada DIY, masyarakat lebih memilih tokoh yang memiliki elektabilitas di tingkat lokal. Menurutnya, elektabilitas tersebut didapatkan para tokoh dari hubungan yang terjalin dengan para pendukung secara dekat.

"Masyarakat Jogja memiliki ikatan emosional terhadap partai yang mengusung *wong cilik* daripada [pasangan yang berasal dari partai] koalisi KIM plus," ujarnya.

Sejumlah program yang dipaparkan para pasangan calon antara lain perluasan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses kesehatan masih menarik minat masyarakat untuk memberikan dukungannya. "Kalau mereka [pasangan calon kepala daerah] dekat dengan masyarakat bawah atau tidak terlalu elite, yang program realistik. Masyarakat lebih memilih [pasangan calon kepala daerah tersebut]," ujarnya.

Menurutnya, pola kemenangan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada berbeda dengan kemenangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu yang dihelat Februari lalu.

Menurutnya, masyarakat lebih memilih pasangan calon yang memahami permasalahan lokal dan memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal. "[Pilkada] Itu masyarakat yang dekat di tingkat lokal. Kedekatan terhadap masyarakat di tingkat lokal membuat mereka [pasangan calon kepala daerah] dipilih," ujarnya.

Sementara pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat lebih memilih tokoh yang dinilai memahami permasalahan dan memiliki ketokohan di tingkat nasional, dan internasional.

(JIBI/Bisnis.com/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005